



Analisis Implementasi Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah Di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru

Analysis of the Implementation of the School Children's Immunization Month Program at the Sidomulyo Health Center, Pekanbaru City

Anggi Wahyuni^{1*}, Kiswanto², Jasrida Yunita³ Budi Hartono⁴, Dedi Widodo⁵, Asfeni⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Hang Tuah Pekanbaru

ABSTRACT

The School Children Immunization Month program aims to protect children against Immunization-Preventable Diseases until school age. In percentage terms, BIAS achievement is far from the target, with the highest immunization coverage of only around 18% Measless Rubella, and the lowest 6.3% Diphterie Tetanus 2. Sidomulyo Community Health Center and it was the lowest coverage in the city. The success of the BIAS program policy implementation is influenced by various interrelated factors. This study aims to analyze the implementation of the School Children Immunization Month Program at the Sidomulyo Community Health Center in Pekanbaru City in 2025. This qualitative study was conducted in July 2025 with 14 informants. Research variables include communication, resources, implementer attitudes, bureaucratic structure, environment, and policy standards and targets. The results show that communication is not optimal even though the program is running, good technical implementation is supported by adequate facilities and professional staff, and the attitudes of officers influence parental trust. The program involves the Community Health Center, Health Office, Education Office, schools, and community leaders, but participation is still low due to religious, social, cultural, and hoax factors. Despite clear SOPs, vaccination targets have not been achieved for the past three years. It is recommended to improve interactive communication strategies, strengthen education and cross-sector coordination, and map areas for evaluation and improvement of program implementation

Keywords : *Community health center pekanbaru, immunization, policy implementation, school children immunization month*

ABSTRAK

Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) bertujuan untuk melindungi anak terhadap penyakit Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) pada usia anak sekolah. Capaian imunisasi BIAS di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru hanya sekitar 18% (BIAS MR), dan terendah 6,3% (BIAS DT-2) merupakan capaian terendah di kota Pekanbaru. Keberhasilan dari implementasi kebijakan program BIAS ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru Tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan telah dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025 dengan jumlah informan sebanyak 14 orang. Variabel penelitian meliputi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan, serta standar dan sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi belum optimal meski program berjalan, pelaksanaan teknis baik didukung sarana memadai dan tenaga profesional, serta sikap petugas mempengaruhi kepercayaan orang tua. Program melibatkan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, dan tokoh masyarakat, namun partisipasi masih rendah karena faktor sosial, budaya, dan hoaks. Meski ada SOP jelas, target vaksinasi belum tercapai selama tiga tahun terakhir.

Kata Kunci : *Bulan imunisasi anak sekolah, implementasi kebijakan, imunisasi, puskesmas pekanbaru*

Corresponding author : Anggi Wahyuni

Email : saiaanggi@gmail.com

• Received 19 November 2025 • Accepted 22 Januari 2026 • Published 9 April 2026

• p - ISSN : 2088-7612 • e - ISSN : 2548-8538 • DOI: <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol11.Iss3.2406>

PENDAHULUAN

Imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan paling efektif dan terjangkau untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap berbagai penyakit menular. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin sehingga terbentuk kekebalan (imunitas) pada individu terhadap penyakit tertentu [1]. BIAS adalah program nasional yang bertujuan memberikan kekebalan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) pada anak sekolah dasar atau sederajat. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali setahun, yaitu pada bulan Agustus untuk pemberian imunisasi Measles Rubella (MR) dan pada bulan November untuk imunisasi Diphtheria Tetanus (DT) di kelas 1, serta Tetanus Diphtheria (Td) di kelas 2 dan kelas 5 [2].

Di Provinsi Riau target cakupan imunisasi lanjutan melalui BIAS adalah 70% pada 2022, meningkat menjadi 80% pada 2023, dan 90% pada 2024. Namun, capaian pada tahun 2022 menjadi 77%, tahun 2023 rata-rata hanya 75%, sedangkan tahun 2024 justru turun drastis menjadi 13,27%. Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2024 menunjukkan capaian BIAS TD hanya 13,5%, BIAS DT 30,8%, BIAS Campak 36%, dan BIAS HPV 14,6%, jauh di bawah target yang ditetapkan. Capaian Kota Pekanbaru menunjukkan angka yang tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Riau. Berdasarkan data capaian program imunisasi BIAS per antigen tahun 2024, Kota Pekanbaru hanya mencapai 29,05% untuk MR-1, 27,03% untuk DT-1, 25,21% untuk TD-1, 25,11% untuk TD-2, 38,41% untuk HPV-1, dan 43,69% untuk HPV-2. Angka-angka ini sebagian besar berada di bawah rata-rata provinsi yang masing-masing mencapai 64,38% (MR-1), 43,05% (DT-1), 42,12% (TD-1), 38,39% (TD-2), 41,53% (HPV-1), dan 43,69% (HPV-2) [3].

Capaian imunisasi di Puskesmas Sidomulyo tahun 2023 berada di posisi rendah. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2024. Meski ada peningkatan di beberapa wilayah, rata-rata cakupan kota masih di bawah 50%. Namun Sidomulyo kembali menempati posisi cakupan

terendah. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi program BIAS di wilayah kerja Puskesmas Sidomulyo. Berdasarkan data pengelola Puskesmas Sidomulyo tahun 2024, diketahui capaian BIAS MR hanya tercapai 18%, untuk BIAS DT-1 tercapai hanya 9,2%, untuk BIAS DT-2 capaian sebesar 6,3%, dan BIAS HPV-1 capaiannya sebesar 8,5%. Cakupan tersebut diketahui masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan.

Menurut Rahmatillah et al., (2023), keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan implementasi dari suatu program yaitu teori Edward III [4]. Menurut teori Edward, ada empat variabel penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi [5]. Selain teori Edward, sebuah implementasi kebijakan juga dapat diukur dengan teori model Van Meter dan Van Horn. Forwanti dan Ferry (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berkontribusi dalam mendukungnya. Jika lingkungan tersebut tidak mendukung atau tidak kondusif, hal itu akan menjadi hambatan bagi tercapainya keberhasilan implementasi [6]. Namun, hambatan masih ditemukan pada aspek sumber daya manusia dan fasilitas, serta pada ketidakkonsistenan implementasi program di tingkat operasional. Hal ini sejalan dengan teori Van Horn dan Van Meter, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik [7]. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana dan intensifikasi komunikasi antara petugas dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru.

METODE

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Puskesmas Sidomulyo Pekanbaru, SDIT Al Izhar Pekanbaru, SD Husna Yaini Pekanbaru dan SDIT Ibnu Qayum Pekanbaru pada bulan Juni - Juli tahun 2025.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Puskesmas Sidomulyo sebagai Informan Kunci, 1 orang Penanggung Jawab Imunisasi Puskesmas, 1 orang Tenaga Pelaksana Program BIAS, 1 orang Penanggung Jawab Promosi Kesehatan, dan 1 orang perwakilan Dinas Kesehatan bidang penyedia sarana dan prasarana program imunisasi sebagai Informan Utama, serta 3 orang orang tua siswa Sekolah Dasar, 3 orang Guru Sekolah Dasar dan 3 orang Kepala Sekolah Dasar sebagai Informan Pendukung.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data kualitatif, menganalisisnya berdasarkan tema-tema.

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi

Kaji Etik

Penelitian ini sudah dilakukan kaji etik dengan nomor 246/KEPK/UHTP/V/2025.

HASIL

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, proses komunikasi antara Puskesmas, pihak sekolah, dan orang tua sudah dilakukan melalui pertemuan

langsung, surat edaran, leaflet, dan media sosial. Namun, efektivitasnya masih rendah karena sebagian orang tua ragu, tidak responsif, atau menolak imunisasi. Komunikasi dengan orang tua menjadi tantangan utama Puskesmas biasanya melakukan kontak langsung dengan pihak sekolah untuk memfasilitasi pertemuan dengan orang tua:

"Selama ini kalau ada kegiatan BIAS kita melakukan kontak face to face ke kepala sekolahnya... pihak sekolah memfasilitasi untuk pertemuan dengan orangtuanya." (IK)

"Kalau ke orangtua biasanya ... sosialisasi sebelum kita turun... lewat undangan... mengingatkan kembali ... melalui WA fkom sekolah." (IU 1)

Upaya melalui media sosial juga belum optimal:

"Kami sudah coba pakai media sosial... share video... Tapi banyak yang tidak tertarik atau ragu." (IU 4)

"Komunikasinya sebenarnya sudah ada." (IP 1)

Respons orang tua beragam, banyak yang ragu terhadap keamanan vaksin sehingga menghambat penyampaian informasi.

"Metodenya sudah beragam... tapi hasilnya masih belum optimal... banyak juga yang tetap tidak merespons atau tidak mengizinkan anaknya imunisasi." (IK)

"Tergantung tingkat pendidikan... kadang suku mempengaruhi." (IU 1)

"Hambatannya orang tua yang merasa anaknya sehat-sehat aja...terus...ngikut-ngikut... peran sekolah juga penting." (IU 1)

"Mereka ngomporin orang tua lain supaya ikut nolak...kalau sekolah tidak aktif makin sulit." (IU 3)

"Banyak yang ragu... banyak yang menolak diam-diam." (IP 1)

"Kadang ada yang mau bekerja sama...komunikasi dua arah membuat mereka lebih percaya." (IP 5)

Untuk mengatasi hambatan, diperlukan dukungan guru, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat.

"Kita tidak bisa bergerak sendiri... butuh

dukungan... agar pesan... lebih dipercaya.”
(IK)

“Kita datangi trus kita edukasi.” (IU 2)

Keberhasilan program BIAS sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang jelas, terbuka, dan melibatkan orang tua.

“Kalau orang tua merasa dilibatkan... mereka lebih terbuka.” (IK)

Perlu perluasan media sosialisasi, misalnya “toa keliling” (IU 3; IK)

Perlu jalur komunikasi dua arah yang lebih jelas dan koordinasi antar instansi yang lebih kuat.

“Mungkin harus ada jalur komunikasi dua arah...” (IP 1)

“Koordinasi... kadang kurang lancar... penyuluhan harus lebih massif.” (IP 7)

Sumber Daya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam Program BIAS sudah mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, karena petugas yang terlibat wajib memiliki STR dan telah mendapatkan pelatihan.

“Petugasnya sudah memenuhi syarat semua... wajib punya STR aktif” (IK)

“Petugas... memang sudah professional” (IP 4)

“Sudah memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai” (IP 7)

Anggaran dinilai memadai dan tidak mengalami kendala, dengan pengawasan yang baik melalui pelaporan, ditunjukkan oleh pernyataan:

“Tidak ada kendala, anggaran... memadai” (IU 3)

“Selalu ada pelaporan dan pertanggungjawaban... Tidak ada pemborosan” (IK)

Sarana, prasarana, serta logistik juga lengkap dan sesuai standar, termasuk vaksin, alat suntik, cool box, dan kendaraan distribusi, sebagaimana disebutkan:

“Semuanya sudah lengkap dan dalam kondisi baik” (IK)

“Distribusinya merata dan tepat waktu” (IU 3)

Aspek sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana dalam pelaksanaan BIAS dinilai memadai dan tidak mengalami hambatan berarti.

Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa Program BIAS dianggap sangat baik untuk mencegah penyakit pada anak, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya Puskesmas tetapi juga Dinas Pendidikan, sekolah, dan guru. Sebagian informan kunci dan utama percaya imunisasi bermanfaat, sementara beberapa informan pendukung masih ragu.

“Program BIAS ini sangat baik ya, cuma memang butuh sinergi dari semua pihak...” (IK)

“Saya percaya program ini memberikan perlindungan yang efektif...” (IK)

“Bagus programnya.” (IU 2, IU 4, IP 6, IP 8)

“Mungkin bermanfaat, tapi saya masih ragu...” (IP 1)

“...ada anak yang justru jatuh sakit setelah imunisasi...” (IP 5)

Puskesmas juga menghadapi penolakan dari orang tua, tetapi tetap melakukan edukasi ke sekolah dan masyarakat.

“Pernah... anak saya sempat tidak ikut...” (IP 1)

“Ya pasti ada... tetap kasih penyuluhan terus.” (IU 1)

“Ya kita berikan penjelasan lagi...” (IU 2)

“Iya, kami sering menemui penolakan...” (IU 4)

Sikap pelaksana dinilai mempengaruhi kelancaran program, sehingga penempatan dan rolling petugas dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan.

“...saya mencoba atur siapa yang bertugas...” (IK)

“Iya, bisa berpengaruh...” (IU 3)

“...sesekali tukar penempatan...” (IU 4)

“Iya, kalau petugasnya cuek dan tegang...” (IP 1)

“Kalau petugas datang dengan sikap kaku...”

(IP 5)

"Sikap pelaksana memang berpengaruh..."

(IP 9)

Pelaksanaan Program BIAS dinilai bermanfaat dan penting untuk kesehatan anak, namun masih menghadapi tantangan berupa keraguan dan penolakan dari sebagian orang tua atau masyarakat. Namun, Puskesmas tetap melakukan upaya sosialisasi dan menyesuaikan penempatan petugas untuk menjaga kelancaran program.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara, struktur organisasi yang terlibat dalam implementasi Program BIAS di Puskesmas Sidomulyo meliputi IDAI, IBI, dan kader. Dukungan pimpinan atau tokoh masyarakat dinilai sangat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program.

"Di daerah kami, yang terlibat itu IDAI, IBI, dan kader..." (IK)

"Sangat berpengaruh. Dukungan dari pimpinan pusat dan daerah itu penting sekali..." (IK)

"Semuanya sangat berperan. Tanpa dukungan dari pimpinan... program bisa terhambat." (IU 4)

Struktur birokrasi juga memengaruhi kemudahan pelaksanaan tugas terkait BIAS. Namun, para informan menyebutkan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan berarti dan koordinasi antarinstansi berjalan baik.

"Sangat besar pengaruhnya. Kalau birokrasi jelas dan terkoordinasi..." (IK)

"Pengaruhnya besar. Kalau struktur birokrasinya baik..." (IU 4)

"Selama ini sih tidak ada ya, berjalan lancar saja." (IK)

"Tidak ada kendala berarti sejauh ini..." (IU 3)

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan wawancara, kondisi ekonomi masyarakat diduga mempengaruhi partisipasi dalam Program BIAS. Meski vaksin gratis, partisipasi di sekolah-sekolah dekat pasar atau

daerah padat penduduk cenderung lebih rendah dibandingkan dengan keluarga menengah ke atas.

"Menurut saya mungkin ada pengaruhnya... partisipasinya lebih rendah..." (IK)

"Ada pengaruhnya... yang minim partisipasinya itu orang di area pasar." (IU 1)

"Tidak ada, semua vaksin gratis..." (IU 4)

Walau tidak dipungut biaya, kekhawatiran akan biaya tambahan setelah imunisasi serta misinformasi ikut memengaruhi keikutsertaan.

"Karena mereka berpikir soal pengeluaran tambahan..." (IP 5)

"...pengaruh hoaks, mereka pikir vaksin itu nanti mahal..." (IP 8)

Faktor sosial budaya memiliki pengaruh signifikan. Kepercayaan agama, mitos, tingkat pendidikan rendah, serta hoaks sering menjadi alasan penolakan. Dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader dapat meningkatkan penerimaan.

"Sangat mempengaruhi... kalau tokoh agama atau kader... masyarakat jadi lebih yakin." (IK)

"...banyak yang percaya mitos... vaksin tidak halal atau berbahaya." (IP 1)

"...vaksin itu bikin anak jadi lemah atau tidak subur." (IP 3)

"...orang tua yang pendidikannya rendah... mudah termakan isu hoax." (IP 4)

"Sangat berpengaruh... katanya vaksin haram... perlu pendekatan tokoh masyarakat." (IP 8)

Faktor politik juga berpengaruh. Dukungan politik dan kebijakan pemerintah terhadap BIAS di Pekanbaru, khususnya di Puskesmas Sidomulyo, sangat kuat. Tidak ada larangan pelaksanaan, dan koordinasi antarlembaga berjalan baik. Pergantian kepala daerah tidak memengaruhi kesinambungan program; dukungan camat, lurah, dan Kapus turut memperkuat legitimasi.

"Pemerintah sangat mendukung... tidak ada larangan..." (IK)

"Kadiskes dan Kapus mendukung... kerjasama dengan disdik..." (IU 1)

"Pergantian walikota tidak ada pengaruh..."

(IU 3)

“...ajak camat, lurah, bu Kapus ikut turun...”

(IU 4)

Dengan demikian, meskipun faktor ekonomi, sosial budaya, dan politik memengaruhi partisipasi masyarakat, terutama faktor sosial budaya, kondisi politik dan dukungan kebijakan yang kuat membantu menjaga keberlanjutan dan efektivitas Program BIAS di wilayah Puskesmas Sidomulyo.

Lingkungan Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program BIAS di Puskesmas Sidomulyo telah memiliki dasar regulasi yang kuat melalui SOP, SKB 4 Menteri Tahun 2022, serta Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022. Sasaran utama program adalah siswa SD kelas 1, 2, dan 5, serta kelas 6 untuk vaksin HPV.

“Ada SOP-nya terkait pelaksanaan program BIAS...” (IK)

“Sasaran utama adalah anak SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 5...kelas 6 sekarang vaksin HPV...” (IK)

“Pelaksanaan BIAS ini sesuai dengan SKB 4 Menteri Tahun 2022... perwako nomor 13 Tahun 2024...” (IK)

Namun, target cakupan vaksinasi belum tercapai selama tiga tahun berturut-turut. Hoaks yang beredar menjadi tantangan utama dan memicu keraguan orang tua.

“Sayangnya belum tercapai ya... tiga tahun berturut-turut...” (IK)

“Tantangan terbesar adalah banyaknya hoaks... sulit meyakinkan orang tua...” (IK)

Peran serta orang tua dan sekolah dinilai belum optimal sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

“Peran serta orangtua... sulit memberikan pengertian... peran sekolah sangat diperlukan.” (IU 1)

“Perlu peran serta sekolah dan orang tua agar dapat mengedukasi dan meningkatkan partisipasi anak-anak”. (IU 4)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, dapat disimpulkan bahwa program BIAS di wilayah Puskesmas Sidomulyo telah memiliki SOP dan kebijakan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan, dengan sasaran utama anak-anak sekolah dasar. Program ini juga didukung oleh dasar hukum dan kebijakan yang kuat dari pemerintah, menjadikan imunisasi sebagai bagian penting dalam upaya perlindungan kesehatan anak sekolah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan komunikasi antara Puskesmas, pihak sekolah, dan orang tua dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) telah dilakukan melalui berbagai metode seperti pertemuan langsung, surat edaran, leaflet, grup *Whatsapp*, dan video edukasi di media sosial. Namun, efektivitasnya belum optimal karena tidak semua orang tua dapat dijangkau, terutama yang ragu atau menolak imunisasi. Kendala ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, budaya, dan persepsi terhadap keamanan vaksin yang memengaruhi penerimaan informasi. Selain itu, penolakan sebagian orang tua dapat menular secara sosial dan diperparah oleh peran sekolah yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan BIAS serta pola komunikasi yang masih satu arah, sehingga keraguan orang tua tidak terjawab dengan baik. Akibatnya, cakupan vaksinasi belum optimal karena sebagian anak tidak diizinkan mengikuti imunisasi, yang berpotensi menghambat pencapaian target program dan meningkatkan risiko munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program BIAS di sekolah dasar.

Menurut teori implementasi George C. Edward, dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas dari para pelaksana mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Informasi ini perlu disampaikan dengan efektif kepada kelompok sasaran. Semakin baik komunikasi maka akan

semakin baik implementasinya [5]. Dalam hal ini perlu diadakan pengurangan distorsi informasi, transparansi. Selain itu, kunci dalam pelaksanaan komunikasi adalah transmisi, konsistensi dan charity [8]. Menurut Luinski (2023), komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam implementasi program tersebut [9]. Zafirah et al. (2024) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kejelasan dalam regulasi terkait implementasi program imunisasi dapat diwujudkan melalui komunikasi yang efektif mengenai pelaksanaan program [10].

Komunikasi memegang peran penting dalam keberhasilan Program BIAS. Meskipun komunikasi sudah berjalan, masih kurang interaktif dan belum menjangkau semua orang tua secara efektif, sehingga menimbulkan penolakan akibat kurangnya pemahaman dan pengaruh hoaks. Teori George C. Edward menjelaskan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan transparan sangat diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan lancar tanpa salah paham. Pemanfaatan media sosial dan komunikasi langsung oleh petugas kepada orang tua dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi [5].

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program BIAS secara teknis dan operasional berjalan dengan baik, didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional, berkualifikasi, serta telah mendapatkan pelatihan memadai. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia sebagai salah satu pilar utama implementasi program telah terpenuhi dengan baik. Selain itu, sistem pengelolaan anggaran dan logistik yang efisien semakin memperkuat fondasi pelaksanaan program, memastikan ketersediaan vaksin dan perlengkapan yang diperlukan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Namun demikian, masih ditemukan kendala signifikan, terutama pada aspek sosial dan komunikasi, yaitu kurangnya pemahaman sebagian orang tua mengenai kualifikasi petugas kesehatan serta adanya keraguan terhadap imunisasi anak sekolah.

Temuan ini mengindikasikan adanya gap informasi dan kepercayaan yang berpotensi menghambat pencapaian target imunisasi. Oleh karena itu, meskipun aspek teknis sudah berjalan optimal, dimensi komunikasi dan edukasi publik masih perlu ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward yang menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya, informasi, wewenang pelaksana, dan fasilitas pendukung sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut teori ini, keterbatasan pada salah satu dimensi tersebut dapat menghambat efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks Program BIAS, keterbatasan informasi yang tepat dan efektif kepada orang tua merupakan hambatan utama, meskipun aspek sumber daya manusia dan fasilitas sudah memadai [5].

Berdasarkan hasil penelitian, sikap pelaksana dalam Program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) pada Puskesmas Sidomulyo secara umum menunjukkan komitmen yang positif. Para tenaga kesehatan meyakini bahwa program ini bermanfaat untuk mencegah penyakit pada anak-anak, serta tetap konsisten melaksanakan imunisasi meskipun menghadapi penolakan atau keraguan dari sebagian orang tua. Pelaksana juga berupaya menjaga semangat tim dengan melakukan rotasi penugasan, memotivasi petugas, dan menyesuaikan penempatan tenaga sesuai karakteristik sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana memiliki kontribusi langsung terhadap kelancaran implementasi program, sesuai teori Edward III yang menekankan bahwa sikap pelaksana berperan besar dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan [5]. Meskipun program BIAS telah berjalan, masih terdapat kendala dalam penerimaan masyarakat, terutama karena keraguan terhadap imunisasi akibat pengalaman atau cerita tentang efek samping seperti demam, yang menurunkan partisipasi anak di sekolah. Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana jika petugas dianggap kaku dan kurang komunikatif, orang tua cenderung enggan mengizinkan anaknya

diimunisasi, sedangkan pendekatan yang ramah dan persuasif dapat menumbuhkan kepercayaan. Selain itu, dukungan lintas sektor, khususnya dari sekolah dan Dinas Pendidikan, masih terbatas sehingga beban meyakinkan masyarakat lebih banyak ditanggung oleh Puskesmas. Kurangnya keterlibatan aktif pihak non-medis menyebabkan pelaksanaan program cenderung terpusat pada sektor kesehatan semata [11]. Hal ini dapat diperkuat dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edward, yang menegaskan bahwa karakteristik pribadi pelaksana seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis memainkan peran krusial dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pelaksana yang memiliki disposisi positif cenderung mampu memahami dan menjalankan kebijakan sesuai dengan niat pembuat kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar dan sesuai target. Budiyan et al. (2020) juga menegaskan bahwa dukungan dan sikap positif dari aparat pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi [8].

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi Program BIAS di wilayah kerja Puskesmas Sidomulyo telah tersusun dengan baik. Keterlibatan organisasi profesi seperti IDAI, IBI, serta kader kesehatan, didukung oleh arahan pimpinan dan tokoh masyarakat, menjadi faktor penting yang memperkuat pelaksanaan program di lapangan. Dukungan pimpinan pusat dan daerah, khususnya dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran, turut memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan standar operasional dan tidak mengalami hambatan berarti. Temuan ini menunjukkan bahwa alur kerja, mekanisme koordinasi, dan pembagian tugas antar lembaga sudah cukup jelas sehingga pelaksanaan program berlangsung lancar. Terdapat potensi kendala dalam pelaksanaan Program BIAS apabila struktur birokrasi tidak berjalan konsisten, seperti melemahnya dukungan pimpinan atau kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang dapat menghambat implementasi di lapangan, menunda distribusi sumber daya, dan melemahkan

kepercayaan masyarakat. Keberhasilan program sangat bergantung pada kesinambungan koordinasi dan kepemimpinan yang mendukung, sejalan dengan pandangan Budiyan et al. (2020) bahwa struktur birokrasi berperan penting melalui prosedur kerja, hierarki, koordinasi, dan pemberian wewenang [8]. Tangkah (2022) menambahkan bahwa kelemahan birokrasi, seperti komunikasi tidak efisien atau pembagian wewenang yang tidak jelas, dapat menghambat pelaksanaan meskipun sumber daya dan komitmen pelaksana tersedia [12]. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi [5]. Dalam konteks Program BIAS di Puskesmas Sidomulyo, dukungan organisasi profesi, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat yang terintegrasi dengan sistem birokrasi formal menciptakan kondisi implementasi yang kondusif. Dengan demikian, keberhasilan Program BIAS tidak hanya bergantung pada sumber daya dan komunikasi, tetapi juga pada efektivitas dan adaptivitas struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru. Ketiga faktor ini memiliki keterkaitan erat dengan variabel-variabel utama dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang secara bersama-sama menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Secara politik, Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui kebijakan yang mendukung imunisasi, seperti Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Imunisasi, yang berfungsi memperkuat struktur birokrasi dan koordinasi lintas sektor. Dukungan politik ini juga menjamin kesinambungan pelaksanaan Program BIAS meskipun terjadi pergantian kepemimpinan,

selama advokasi dan koordinasi lintas sektor tetap konsisten [13]. Dari aspek ekonomi, meskipun program ini gratis, sebagian masyarakat masih berasumsi bahwa imunisasi menimbulkan biaya tambahan akibat efek samping ringan, sehingga diperlukan penyuluhan intensif dan dukungan anggaran untuk menegaskan bahwa imunisasi sepenuhnya tanpa biaya. Aspek sosial-budaya juga menjadi tantangan, karena munculnya keraguan terhadap kehalalan vaksin, rendahnya pendidikan, dan penyebaran hoaks yang memengaruhi penerimaan masyarakat. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 33 Tahun 2018 memberikan legitimasi keagamaan bahwa imunisasi diperbolehkan, bahkan wajib dalam kondisi darurat, sehingga memperkuat komunikasi dan kepercayaan publik. Pelibatan tokoh agama dan masyarakat terbukti efektif meningkatkan partisipasi imunisasi, sementara dukungan sektor swasta dapat memperluas jangkauan edukasi dan menekan penyebaran hoaks [14][15]. Secara keseluruhan, faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya saling berinteraksi memperkuat elemen-elemen teori implementasi kebijakan Edward III, struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi yang bersama-sama menentukan keberhasilan pelaksanaan Program BIAS di wilayah kerja Puskesmas Sidomulyo.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program BIAS di Puskesmas Sidomulyo telah memiliki dasar regulasi yang kuat, meliputi SOP pelaksanaan, SKB 4 Menteri Tahun 2022, Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022, serta Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2023 tentang Imunisasi yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan vaksin, tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor [16][17]. Standar dan sasaran program yang jelas, seperti pelaksanaan di 48 sekolah untuk siswa SD kelas 1, 2, 5, dan 6, sejalan dengan teori Van Metter dan Van Horn yang menekankan pentingnya tujuan yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan [7]. Namun, meskipun regulasi dan sumber daya telah memadai, capaian cakupan vaksinasi belum optimal selama tiga tahun

terakhir karena rendahnya partisipasi masyarakat, penyebaran hoaks, dan kurangnya dukungan sekolah dalam sosialisasi. Berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan kebijakan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi, karakter pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Program BIAS memerlukan keterlibatan aktif semua pihak sekolah, tenaga kesehatan, dan orang tua agar kebijakan yang kuat dapat terimplementasi secara efektif di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru tahun 2025 telah memiliki dasar regulasi yang kuat, sumber daya yang memadai, serta komitmen pelaksana yang tinggi. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh komunikasi yang belum optimal, terutama karena sifatnya yang satu arah, rendahnya partisipasi orang tua, dan pengaruh hoaks yang menimbulkan keraguan terhadap vaksin. Meskipun koordinasi antarinstansi berjalan cukup baik, sinergi dengan Dinas Pendidikan dan madrasah masih perlu diperkuat agar pelaksanaan lebih terintegrasi. Dukungan politik melalui Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 menjadi faktor penguat legalitas program, tetapi faktor sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi tantangan dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Berdasarkan teori George C. Edward III dan Van Metter & Van Horn, keberhasilan implementasi BIAS di Sidomulyo sangat bergantung pada efektivitas komunikasi, sikap pelaksana yang responsif, serta partisipasi aktif seluruh pihak dalam menerjemahkan kebijakan yang jelas menjadi tindakan nyata di lapangan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, terutama para informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiyati, Nuning. (2024). BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Tahun 2024.
- [2] Kementerian Kesehatan RI (2022) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jakarta. Teknis Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
- [3] Dinas Kesehatan Provinsi Riau (2024), *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau*
- [4] Rahmatillah, Aqil, Wais Alwarni, dan Afrijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*. Volume 8, No 3, Agustus 2023.
- [5] Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- [6] Forwanti, Eva dan Ferry Setiawan. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 8 No. 2 Tahun 2022.
- [7] Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- [8] Budiyantri, R., Sriatmi, A., Jati, S., & Sudarto, J. (2020). *Buku Ajar Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan*. Semarang: UNDIP Press.
- [9] Luinski, Monika. (2023). Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. *Publika, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik*.
- [10] Zafirah, Siti, Siti Raudah, Moh. Fajar Noorrahman. (2024). Implementasi Kebijakan Program Imunisasi Dasar Lengkap Anak Pada Upt. Puskesmas Rawat Inap Alabio. *Jurnal Kebijakan Publik* Vol. 1, No.2, 2024.
- [11] Indriyana, S., Linasari, D., & Masruroh, E. (2023). Strategy for implementation of School child immunization month program In covid-19 pandemic at batujajar health center. *ACTA Medical Health Sciences*.
- [12] Tangkah, Bruno. (2022). Implementasi Program Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap Di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 11 Nomor 3.
- [13] Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2023 tentang Imunisasi. (2023). Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- [14] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi. (2016). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- [15] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella). (2018). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- [16] Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Dukungan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). (2022). Jakarta: Kemendikbudristek.
- [17] Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2023 tentang Imunisasi. (2023). Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.